

Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Dalam Implementasi Otonomi Daerah di Propinsi Jambi.

Oleh : Etik Umiyati.SE.MSi

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,
Kampus Pinang Masak

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tipologi pertumbuhan ekonomi regional di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah dan Berapa besar disparitas pendapatan antar wilayah/kabupaten di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah Hasil penelitian menunjukkan terlihat bahwa kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam klasifikasi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Daerah yang berkembang cepat adalah kabupaten Sarolangun dan Bungo. Sedangkan Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur termasuk dalam wilayah daerah maju tapi tertekan. Kabupaten Kerinci, Merangin, Batang Hari, Muaro Jambi dan Tebo tergolong kategori daerah relatif tertinggal. Tingkat Disparitas pendapatan di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah Dari hasil pengukuran model indeks Entropi Theil, maka diketahui indeks ketimpangan pendapatan di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah berada pada $I(y)$ 0.129 – 0.148. Ini berarti dengan kriteria Theil, pemerataan pendapatan wilayah Propinsi Jambi berada pada level merata tetapi trend ketimpangan ini cenderung berfluktuasi. Pada awalnya ketimpangan pendapatan meningkat dan pada tahap berikutnya ketimpangan cenderung menurun yang berarti ketimpangan bergeser mendekati pemerataan. Indeks ketimpangan pendapatan yang tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0.148, sedangkan yang terendah pada tahun 2001 sebesar 0.129.

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, Tipologi pertumbuhan ekonomi regional, Disparitas pendapatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 menjadikan pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan perubahan ini setiap daerah berlomba membangun ekonomi dan melakukan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan.

Berdasarkan data statistik Propinsi Jambi berpenduduk sebanyak 2.788.269 jiwa pada tahun 2008 meningkat sebesar 1,7% dari pada tahun 2007. Untuk PDRB tahun 2008 sebesar Rp. 15.296.726,8 juta, mengalami peningkatan sebesar 7,15% dibanding tahun 2007 yang sebesar Rp. 14.275.161 juta. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar Rp. 4.658.837,72 juta atau 30,46% dari jumlah PDRB tahun 2008. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar Rp. 2.559.794 juta atau 16,73%.

Sektor industri pengolahan sebesar Rp. 2.068.252,13 atau 13,52%. Dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 1.851.478,43 atau 12,10%. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih hanya Rp. 117.730,99 atau 0,77% (Sumber : BPS Prop. Jambi).

Setiap kabupaten memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Dimana sektor tersebut yang paling besar penyumbang pada PDRB, seperti sektor pertanian yang paling besar menyumbang pada PDRB dikabupaten Kerinci (Rp. 679.049,57 juta), Kabupaten Merangin (Rp. 473.817,44 juta), Kabupaten Sarolangun (Rp. 502.957,93 juta), Kabupaten Batang Hari (Rp. 342.876,29 juta), Kabupaten Muaro Jambi (Rp. 357.889,60 juta), Kabupaten Tebo (Rp 400.031,20 juta), dan Kabupaten Bungo (Rp. 418.410,16 juta). Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sektor industri pengolahan yang menyumbang terbesar pada PDRB yakni Rp. 632.890,23 juta. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang terbesar pada PDRB yaitu Rp. 871.478,93 juta (BPS Prop.Jambi)

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mencoba mengidentifikasi dan menganalisa serta mengkaji tentang tipologi pertumbuhan ekonomi dalam implementasi otonomi daerah di Propinsi Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisa Ekonomi Regional. Alasannya jelas karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh lambat. Disamping itu, analisa pertumbuhan ekonomi regional ini juga dapat menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi regional adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya serta berusaha meningkatkan kemampuan wilayah dalam menumbuh kembangkan wilayah

tersebut berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan, serta peran penting mendasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut pada potensi atau sumber daya yang ada, pada suatu daerah dengan memasukkan unsur ruang atau space antar suatu wilayah dengan wilayah lain.

Teori Tipologi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Syafrijal (1997) Pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat digambarkan melalui tipologi Klassen . Alat analisis ini didasarkan pada dua indicator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di suatu daerah. Dengan menentukan pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal.

Klasifikasi daerah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu :

Kuadran I yaitu daerah/kabupaten yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran II yaitu daerah/kabupaten yang berkembang cepat (high growth but low income) merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran III yaitu daerah/kabupaten maju tapi tertekan (low growth but high income) merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran IV yaitu daerah/ kabupaten relative tertinggal (low growth and low income) merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.

III. METODE PENELITIAN

Metode Analisis Deskriptif

Untuk menjawab pokok permasalahan yang ada maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang berangkat dari perkembangan data yang akan diteliti dan dianalisa berdasarkan teori yang ada

Metode Analisis Kuantitatif

Metode Analisis Kuantitatif ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Propinsi Jambi selama tahun 2001-2009.

Untuk melihat tipologi pertumbuhan ekonomi wilayah di Propinsi Jambi, maka digunakan Typologi Klassen, yaitu dengan membandingkan tingkat pertumbuhan (r_i) dan pendapatan per kapita (y_i) Kota/Kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan (r) dan pendapatan per kapita Propinsi Jambi (y). Melalui analisis ini diperoleh 5 klasifikasi daerah yang masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun kriteria secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut :

$r_i > r ; y_i > y$ = Daerah maju dan tumbuh pesat

$r_i > r ; y_i < y$ = Daerah berkembang dengan pesat

$r_i < r ; y_i > y$ = Daerah maju tapi tertekan

$r_i < r ; y_i < y$ = Daerah kurang berkembang

Untuk menghitung besarnya disparitas pendapatan antar wilayah digunakan rumus Indeks Entropi Theil yaitu (Ying, 2000 dalam Mudrajad Kuncoro, 2002).

Indeks Entropi Theil (I(y))

$$I(y) = \sum (y_j / Y) \log [(y_j / Y) / (x_j / X)]$$

Dimana :

I(y) : Indeks Entropi Theil

y_j : pendapatan perkapita di daerah j (Kabupaten/kota) = PDRB / jumlah penduduk

Y : pendapatan perkapita Provinsi

x_j : Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota j

X : Jumlah Penduduk Provinsi

Besarnya I(y) : $0 \leq I(y) \leq 1$

Dimana :

- I(y) = mendekati 0, berarti ketimpangan semakin kecil (merata).
- I(y) = mendekati 1, berarti ketimpangan semakin besar (tidak merata)

IV. HASIL PENELITIAN

Pada awal tahun diberlakukannya otonomi daerah 2000 PDRB Provinsi Jambi sebesar Rp. 9.569.242 Juta dan pada tahun 2001 sebesar Rp. 4.141.320 Juta atau meningkat sebesar 6,65 persen. Tetapi pada tahun berikutnya terjadi penurunan pertumbuhan mulai tahun 2002 dan tahun 2003. Pada tahun 2004 dan 2005 PDRB Propinsi Jambi sebesar Rp 11.953.885 dan Rp. 12.619.973 Juta. Dimana terjadi peningkatan pertumbuhannya adalah 5.38 % dan 5.57 %. Dan Pada tahun 2006, 2007 dan 2008 PDRB Propinsi Jambi sebesar Rp. 13.363.620, Rp. 14.275.161 dan Rp. 15.296.726 Juta, dimana terjadi peningkatan pertumbuhannya adalah 5.89 %, 6.82 % dan 7.16%. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jambi pada periode 2000 - 2009 sebesar 5,47 %.

Berdasarkan data yang ada pendapatan perkapita kabupaten /kota selama periode 2000 – 2009 ,nilai pendapatan perkapita rata-rata yang terbesar adalah kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar Rp. 9.100.756,-. PDRB Perkapita Provinsi Jambi dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2000 PDRB Perkapita Provinsi Jambi Rp. 3.975.315. Tahun 2001 sebesar Rp. 4.183.230, terjadi peningkatan sebesar 5.23%. Terus bertambah jumlahnya sebesar 4.16% menjadi Rp. 4.357.152 pada tahun 2002. Tahun 2003 menjadi Rp. 4.416.137 meningkat 1.35%. Tahun 2004 sebesar Rp. 4.563.330, terjadi peningkatan sebesar 3.33%. Terus bertambah jumlahnya sebesar 4.06% menjadi Rp. 4.478.750 pada tahun 2005. Tahun 2006 menjadi Rp. 4.980.666 meningkat 4.88%. Tahun 2007 sebesar Rp. 5.205.741, terjadi peningkatan sebesar 4.52%. dan tahun 2008 menjadi Rp. 5.486.101 dengan peningkatan sebesar 5.39%. Rata-rata kenaikan PDRB Perkapita dari tahun 2001-2009 yaitu sebesar 3.55%.

V.KESIMPULAN

Berdasarkan Analisa Tipologi Klassen terlihat bahwa kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam klasifikasi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Daerah yang berkembang cepat adalah kabupaten Sarolangun dan Bungo. Sedangkan Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur termasuk dalam wilayah daerah maju tapi tertekan. Kabupaten Kerinci, Merangin, Batang Hari, Muaro Jambi dan Tebo tergolong kategori daerah relatif tertinggal. Tingkat Disparitas pendapatan di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah

Dari hasil pengukuran model indeks Entropi Theil, maka diketahui indeks ketimpangan pendapatan di Propinsi Jambi setelah implementasi kebijakan otonomi daerah berada pada $I(y)$ 0.129 – 0.148. Ini berarti dengan kriteria Theil, pemerataan pendapatan wilayah Propinsi Jambi berada pada level merata tetapi trend ketimpangan ini cenderung berfluktuasi. Pada awalnya ketimpangan pendapatan meningkat dan pada tahap berikutnya ketimpangan cenderung menurun yang berarti ketimpangan bergeser mendekati pemerataan. Indeks ketimpangan pendapatan yang tertinggi pada tahun 2009 sebesar 0.148, sedangkan yang terendah pada tahun 2001 sebesar 0.129.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jambi*. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
- Arifin, Zainal. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten di Jawa Timur*.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Regional*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Azis, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LPFE-UI.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga